

Multiyears Gagal Kesalahan Ketua Dewan

■ Dinas PU Diminta Segera Konsultasi ke BPK ✓

Pontianak, BERKAT.

Batalnya sidang paripurna persetujuan DPRD Kalbar terhadap proyek multiyears (tahun jamak) berbuntut panjang. Ketua DPRD Kalbar, Minsen, SH, dituding sebagai penyebab munculnya masalah tersebut. "Kesalahan itu bukan pada eksekutif, tapi karena lambatnya Ketua DPRD Kalbar menindaklanjuti surat Gubernur yang meminta persetujuan Dewan terhadap proyek multiyears tersebut," tegas Ketua Fraksi PPP DPRD Kalbar, H M Ali Akbar AS, SH, kepada sejumlah wartawan, di ruang kerjanya, Jumat (19/11).

Dia mengungkapkan, Gubernur Kalbar telah melayangkan surat permintaan pembahasan itu ke pimpinan Dewan pada 19 Maret 2010. "Seharusnya segera

diagendakan rapat paripurna persetujuan proyek multiyears untuk tahun 2010-2102. Tapi apa baru sekarang ini dilaksanakan dan itu pun akhirnya batal," sesal Ali Akbar. Anggota Komisi C ini melanjutkan, proyek itu mencakup pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan dengan cara kontrak tahun jamak pada ruas jalan diantaranya, peningkatan jalan Sambas-Subah-Ledo sepanjang 4,2 km senilai Rp12.488,3 miliar. Ada juga peningkatan jalan Sanggau Ledo-Seluas-Batas Serawak sepanjang 4,60 Km, dengan anggaran biaya Rp.6,478 miliar, serta Pergantian jembatan parit Jepang



ALI AKBAR

dan Sungai Rejosari pada ruas jalan Sungai Durian-Rasau Jaya dengan anggaran biaya Rp1,248 M.

Disinggung batalnya rapat paripurna pada 18 November 2010, Ali Akbar mengatakan, pihaknya meminta kepada Dinas PU untuk melengkapi prosedur dan mekanisme yang benar, serta meminta Dinas terkait itu untuk mengkonsultasikan ke BPK. "Jadi yang tidak tahu jangan ngomong," ujarnya. Ia lantas mengingatkan UU Nomor 32 Tahun 2004, dimana pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip NKRI. "Dalam hal ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh eksekutif dan legislatif, yang masing-masing mempunyai tugas dan wewenang dalam rangka mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk itu mari bersama-sama membangun Kalbar, salah satunya melalui proyek multiyears ini," kata Ali Akbar.

Selain itu, ia mengatakan, Fraksi PPP tidak ada menerima tembusan surat Fraksi Partai Golkar yang disampaikan kepada pimpinan rapat paripurna. "Kita tidak ada menerima surat itu, seharusnya surat itu ditembuskan kepada Fraksi-Fraksi," jelas Ali Akbar. (aca)